

	News Title : Bappebti Hentikan Pelatihan Perdagangan Berjangka Ilegal di Bali	
	Media Name : idxchannel.com	Journalist : Wahyudi Aulia Siregar
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt. Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Economics	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

IDX Channel > ECONOMICS

Bappebti Hentikan Pelatihan Perdagangan Berjangka Ilegal di Bali

ECONOMICS Wahyudi Aulia Siregar Minggu, 06 Maret 2022 09:46 WIB

Bappebti menghentikan pelatihan perdagangan ilegal yang dilakukan PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali.



Bappebti Hentikan Pelatihan Perdagangan Berjangka Ilegal di Bali (FOTO: Bappebti)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan [**Kemendag**] melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [**Bappebti**] menghentikan pelatihan perdagangan ilegal yang dilakukan PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali.

Penghentian pertemuan Gamara dilakukan Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali.

BACA JUGA:
Kemendag Tegaskan Crypto Adalah Rerak Bappebti

"Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tegas Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangan tertulis, Minggu (6/3/2022).

Wisnu menambahkan, Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM), serta bekerja sama dengan pialang (broker) Yat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti. Sehingga, acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara merupakan kegiatan ilegal.

BACA JUGA:
Heboh Token Asia Tak Berizin, Anang Hermansyah dan Ashanty Sumbang Bappebti

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison mengatakan penawaran paket-paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar Pasal 49 ayat (1) a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelanggaran ini diancam dengan pidana 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, serta denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

Menurut Aldison, Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BACA JUGA:
Anang Hermansyah Keluarkan Token ASK, Bappebti: Itu Tidak Sesuai Aturan

"Tindakan ini diambil semata-mata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti," imbuh Aldison.

Lebih lanjut, Aldison menerangkan, kegiatan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan promosi, pelatihan, seminar, pertemuan, dan kegiatan sejenis mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi wajib memiliki izin dari Bappebti. Hal ini untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi.

BACA JUGA:
Anang dan Ashanty Sumbang Bappebti Terkait Asik Token

Aldison mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline.

"Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Selalu pastikan legalitas dari Pialang Berjangka yang menawarkan investasi. Jangan mudah terguyur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," tutup Aldison. **[RAMA]**

